

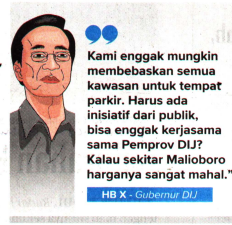


Minta Lahan Nganggur di Malioboro untuk Parkir

JOGIA, Radar Jogja - Salah satu evaluasi libur Lebaran lalu adalah ketersediaan lahan parkir untuk pengunjung Malioboro. Pemprov DIJ mengaku tidak memungkinkan untuk pengadaan lahan di kawasan tersebut. Warga di sekitar Malioboro yang memiliki lahan

nganggur diimbau bisa dimanfaatkan untuk parkir. Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengaku kesulitan mencari lahan kosong untuk parkir di kawasan Malioboro. Terlebih harga tanah sudah sangat mahal

↳ Baca Minta... Hal 7



Minta Lahan Nganggur di Malioboro untuk Parkir

• Sambungan dari hal 1

"Kami enggak mungkin akan membebaskan semua kawasan untuk tempat parkir," ujarnya kemarin (3/5).
 Solusinya? "Jadi harus ada inisiatif dari publik, bisa enggak kerjasama sama Pemprov DIJ? Mosok semuanya harus kami (Pemprov DIJ) yang membebaskan, kalau sekitar Malioboro kan harganya sudah sangat mahal," lanjutnya.
 HB X menyebut salah satu upaya untuk mengatasi persoalan parkir ialah menyewa lahan eks gedung UPN Veteran Jogja yang saat ini sudah menjadi Parkir Ketandan. Meski begitu dinilai masih kurang.
 Ayah lima puteri itu juga menyebut, tempat parkir di

area sekitar Terminal Giwangan Jogja juga sudah diupayakan oleh Pemprov DIJ. Rencananya bus pariwisata dapat parkir di lokasi tersebut. Lalu wisatawan masuk ke kota menggunakan armada lebih kecil.
 Tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Karena pengelolaan Terminal Giwangan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. Di sisi lain, ihwal tarif parkir yang dikelola swasta bisa naik beberapa kali lipat dinilai karena mininya lahan parkir. Meski begitu pihak parkir swasta harus mentaati regulasi yang ada.
 Lebih lanjut, suami GKR Hemas itu berharap warga sekitar Malioboro yang memiliki lahan belum diman-

faatkan dapat digunakan untuk parkir. "Harapan saya sekitar Malioboro, rumah-rumah yang kosong bisa enggak punya kerjasama dengan Pemprov DIJ atau dengan teman-temannya untuk membuat tempat parkir," jelasnya.
 Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti sebelumnya mengatakan pengelola parkir tidak boleh senaknya. Pemprov DIJ meminta pemerintah kabupaten dan kota mengatur tarif parkir.
 Menurut dia, pengelola swasta harus mengikuti standar aturan itu, swasta dimungkinkan menaikkan tarif parkir tapi jangan sampai lebih dari lima kali. (lan/prah/ep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 11 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005